

MOTIVASI INDONESIA MENDIRIKAN KONSULAT KEHORMATAN DI PALESTINA TAHUN 2016

Oleh:

Yuke Bunga*

Email: yukebunga@yahoo.co.id

Pembimbing: Saiman Pakpahan S. IP, M.Si

Bibliografi: 2 Jurnal, 15 Buku, 4 Website.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Prodi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, Riau 28293

Abstrak

This study discusses or examines Indonesia's motivation to appoint Honorary Consulates in Palestine. Indonesia is one of the countries that establish diplomatic relations with many countries, one of which is Palestine. Indonesia's bilateral relationship with Palestine has long been established as Indonesia is one of the first prestigious Palestinian countries after the declaration of the Palestinian State in Algeria, November 15, 1988.

The neo-realist approach used by the researchers to analyze this is considered suitable for the phenomenon being studied. The theory of neorealism (structural realism) is Kenneth Waltz's theory which is an attempt to overhaul the existing theory of realism. In this study using the concept of national interest. In achieving national goals by applying national goals there are factors that influence: interests, threats, capabilities and opportunities.

The Government of Indonesia has established the Consulate of the Republic of Indonesia (RI) in Ramallah, Palestine. However the inauguration of the honorary consulate was not done in Ramallah, Palestine, sailor at the office of the Indonesian Embassy in Amman, Jordan. Konhor in Ramallah was opened by Foreign Minister Retno Marsudi on March 13, 2016.

Kata Kunci: Motivasi, Konsulat Kehormatan, Palestina, Kemerdekaan.

* Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Pendahuluan

Penelitian ini membahas atau mengkaji mengenai motivasi Indonesia mengangkat Konsulat Kehormatan di Palestina. Penelitian ini ditinjau dari sudut pandang diplomasi sesuai dengan konsentrasi penulis. Sebuah negara tidak bisa berdiri tanpa memiliki hubungan kerjasama dengan negara lain. Indonesia adalah salah satu negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara, salah satunya adalah Palestina.

Hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina sudah terjalin sejak lama karena Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya Negara Palestina di Aljazair, 15 November 1988.² Sebagai wujud dukungan lebih lanjut dari Indonesia kepada Palestina, pada tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani "Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik" antara Menlu RI, Ali Alatas, dan Menlu Palestina, Farouq Kaddoumi, yang sekaligus menandai pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta. Namun pada tataran bilateral, kedua negara belum dapat merealisasikan banyak kerja sama nyata sehubungan dengan keterbatasan yang dialami Palestina akibat pendudukan Israel.³ Meskipun demikian, hubungan Indonesia-Palestina senantiasa ditandai dengan komitmen dan dukungan Indonesia yang semakin kuat bagi pengakuan penuh seluruh dunia atas kemerdekaan Palestina.⁴

Pasca dukungan Indonesia terhadap resolusi Majelis Umum pada 2012 yang memberikan Palestina status peninjau (non-member observer), pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2013 terus memanfaatkan hubungan diplomatic yang dimuali sejak November 1988 untuk semakin memperkuat ketahanan Palestina dari berbagai ancaman, termasuk ancaman ekonomi. Diantara langkah pemerintah Indonesia adalah dengan memastikan kerjasama ekonomi dan sosial budaya diantara kedua negara terus terjalin secara berkesinambungan, termasuk melalui penyelenggaraan program-program pengembangan kapasitas bagi warga Palestina.⁵

Dimulai dari sekitar tahun 2000-an, pihak Palestina yang daerahnya mulai diklaim oleh Israel mulai memberontak dan serangan pertama mereka dikenal sebagai Al-Aqsa Intifada. Pada tahun 2002, sebuah resolusi untuk pengakhiran konflik Israel-Palestina diajukan oleh Amerika, Uni Eropa, Rusia, dan PBB. Pada tahun 2004 juga George W. Bush meminta bahwa sebuah negara Palestina bisa hidup berdampingan dengan Israel. Pada tahun 2005, pasukan milisi Palestina mulai menembakkan roket Qassam ke arah Israel. Perang yang tak kunjung henti antara Palestina dan Israel ini menjadi bagian kelam dalam sejarah berdirinya negara Palestina.

Sepanjang 2013, pemerintah Indonesia melalui kantor perwakilannya (KBRI) di Amman, Yordania terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Palestina di

²<http://www.jurnalmuslim.com> (diakses pada tanggal 12 November 2016)

³<http://www.kemlu.go.id/amman/id/Pages/Indonesia---Palestina.aspx> (diakses pada tanggal 12 November 2016)

⁴jurnal Diplomasi Indonesia 2013 hal 122

⁵ ibid

Ramallah, Tepi Barat. Komunikasi dan koordinasi politik juga dilakukan melalui perwakilan/delegasi pemerintah Indonesia di berbagai fora regional dan internasional seperti PBB, OKI (Organisasi Konferensi Islam), Gerakan Non Blok (GNB), dan Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP atau *New Asia Africa Strategic Partnership*).⁶

Konsulat kehormatan pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun area kerjanya hanya pada penanganan hubungan konsuler atau hubungan antarmanusia dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik. Seperti diketahui, untuk memasuki Ramallah dibutuhkan izin dari pemerintah Israel, karena semua perbatasan Palestina dikontrol oleh pemerintah Israel. Sedangkan untuk mendapatkan izin dari Israel dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Keberadaan Konsulat Kehormatan dianggap paling efektif karena Konhor adalah orang lokal yang mempunyai akses ke pemerintah Palestina dan KBRI di Amman.

Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya Negara Palestina di Aljazair, 15 November 1988. Sebagai wujud dukungan lebih lanjut dari Indonesia kepada Palestina, pada tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani "Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik" antara Menlu RI, Ali Alatas, dan Menlu Palestina, Farouq Kaddoumi, yang sekaligus menandai pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta.

Duta Besar pertama Palestina untuk Indonesia menyerahkan Surat-surat

Kepercayaannya kepada Presiden Soeharto pada 23 April 1990. Sebaliknya, Pemerintah RI menetapkan bahwa Duta Besar RI di Tunis juga diakreditasikan bagi Negara Palestina. Sejak 1 Juni 2004, akreditasi Palestina berada di bawah rangkapan KBRI Yordania. Sejak itu, melalui berbagai forum, termasuk PBB, OKI, dan GNB, Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Dalam kaitan ini, Indonesia termasuk negara-negara yang telah memberikan suara dukungan sehingga Palestina dapat menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober 2011, dan memperoleh status "negara" (*non-member observer state*), dari sebelumnya hanya berstatus "entitas" (*non-member observer entity*), dalam keputusan Sidang Majelis Umum PBB 29 November 2012.

Berdasarkan sejarah, hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina sudah lama terjalin, yaitu sejak masa peralihan Indonesia menuju kemerdekaan, Palestina merupakan bangsa pertama di kawasan Timur-Tengah yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia di Radio Internasional melalui Mufti Palestina yang bernama Amin Al-Husaini. Berkat jasa dari Amin inilah, kemerdekaan Indonesia mendapatkan gemanya pada masyarakat Internasional.⁷ Hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina semakin baik setelah ditempatkannya Duta Besar Palestina untuk Indonesia pada 13 September 1993.

Dalam agresi Israel ke Jalur Gaza pada tanggal 27 Desember 2008, sesungguhnya Indonesia bisa lebih

⁶Jurnal diplomasi Indonesia 2013 halaman 123

⁷Shofwan Al-Banna Choiruzzad, Indonesia-Palestina, <http://muftialy.wordpress.com>, 25/08/2017

berperan secara aktif lagi untuk membantu penyelesaian konflik di Jalur Gaza, akan tetapi peran Amerika dalam agresi tersebut menjadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemerintah SBY. Hal ini terbukti dengan kuatnya lobi Yahudi melalui salah satu Organisasi lobi Yahudi yang bernama AIPAC (*American Israel Public Affairs Committee*) pada pemerintahan Amerika Serikat sehingga karena kuatnya lobi Yahudi tersebut mengakibatkan kebijakan pemerintah Amerika harus melalui persetujuan Yahudi. Oleh karena itu, Barrack Obama pada masa kampanye Presiden tanggal 4 Juni 2008 pernah mengatakan bahwa “mereka yang mengancam Israel berarti mengancam kita. Israel selalu saja menghadapi ancaman ini pertama kali, dan saya akan membawa komitmen keamanan Israel ke Gedung Putih. Awalnya adalah memastikan kualitas militer Israel. Saya akan memastikan Israel dapat mempertahankan diri dari ancaman yang datang dari Gaza hingga Teheran. Kerjasama pertahanan antara Israel dan Amerika adalah modal kesuksesan dan harus diperdalam. Sebagai Presiden, “saya akan menyediakan US \$30 Miliar untuk mengawal Israel pada dekade berikutnya, penanaman modal bagi keamanan Israel tidak terikat oleh bangsa lain”⁸

Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan dan kebebasan warga Palestina terus menguat. Hal itu terlihat semakin nyata dengan rencana Indonesia untuk membuka konsulat kehormatan di Ramallah, Palestina. Pembukaan Konsul kehormatan tersebut nantinya akan membuat Indonesia semakin dekat dengan Palestina. Tidak hanya antar-pemerintah,

tapi hubungan antar-masyarakat juga akan semakin kuat. Dalam mekanisme pengangkatan perwakilan konsul karir atau konsul honorer (konsul kehormatan) di Indonesia terdapat beberapa prosedur atau syarat yang harus dilakukan sebelumnya. Dimana prosedur-prosedur yang ada merupakan beberapa tahapan aturan dan pertimbangan untuk melakukan jalinan hubungan konsuler maupun hubungan diplomatik. Prosedur-prosedur tersebut menjadi acuan dalam proses pengadaan hubungan sebelum dilakukannya proses pengangkatan.

Setelah melewati serangkaian proses dan disetujui oleh Presiden barulah dilakukan pengangkatan oleh menteri luar negeri. Proses pengangkatan Konsul kehormatan Indonesia untuk Palestina telah dilakukan pada 13 Maret 2016 oleh menteri luar negeri. Pelantikan dan pembukaan kantor Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina ini merupakan suatu bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina sesama negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dimana pada tanggal 6-7 Maret 2016 baru melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilaksanakan di Jakarta.

Bentuk Kerjasama Indonesia-Palestina:

Bentuk Kerjasama Bidang Ekonomi

Saat ini sudah ada perjanjian kerjasama antara Kamar Dagang Palestina dan Indonesia untuk pendirian Palestinian-Indonesian *Joint Business Council* RI. JBC sudah mengadakan pertemuan pertama, bertepatan dengan Trade Expo Indonesia Oktober tahun 2016 lalu,

⁸Demokrat dan Israel, Majalah Islam Sabili, 25/08/2017, Hal. 51

mitranya disini dengan Kadin. Pertemuan pertama itu dari delegasi Palestina dipimpin langsung sama Konhor RI, Ibu Maha Abu Shuseh karena kebetulan beliau juga seorang pengusaha. Beliau datang ke Indonesia dalam rangka menghadiri TEI sekaligus meresmikan Joint Business Council, kemudian juga kunjungan kehormatan ke Ibu Menlu Retno Marsudi.

Bentuk Kerjasama Bantuan Capacity Building

Kerja sama teknik dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan salah satu alat diplomasi Indonesia dengan negara-negara di Asia dan Afrika. Kerja Sama Selatan-Selatan juga telah dilaksanakan oleh negara-negara di kawasan Asia-Afrika baik dalam kerangka bilateral antar negara maupun secara triangular dengan melibatkan *development partners*.

Indonesia juga telah berkembang menjadi salah satu negara di Asia yang aktif memajukan Kerjasama Selatan-Selatan dengan kawasan Afrika, terutama melalui pelaksanaan bantuan teknis dalam bentuk *capacity building*. Sejak awal tahun 2000, Indonesia telah melaksanakan lebih dari 500 program *capacity building* untuk sedikitnya 4.183 peserta dari kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

Dalam kerangka Asia-Afrika, salah satu fokus pemberian bantuan *capacity building* Indonesia adalah yang ditujukan bagi kemandirian bangsa Palestina. Dukungan terhadap perjuangan Palestina menjadi penting sebagai satu-satunya negara peserta Konferensi Asia-Afrika yang belum merdeka hingga saat ini.

Indonesia senantiasa mendukung upaya membangun Palestina sebagai negara mandiri melalui berbagai program

pembangunan kapasitas guna mempersiapkan sumber daya manusia di Palestina. Program-program tersebut dilaksanakan dalam kerangka bilateral, regional, inter-regional, maupun multilateral.

Dalam kerangka *bilateral*, beberapa bantuan Indonesia untuk Palestina, antara lain adalah:

- a. Pemertintah Indonesia telah memberikan bantuan keuangan kepada Palestina melalui *Paris Donors Conference* pada tahun 2007 sebesar USD. 1,000,000.
- b. Bantuan sebesar Rp. 20 milyar untuk membangun *Indonesian Cardiac Center* pada Rumah Sakit A-Shiifa di Gaza. Bantuan tersebut disampaikan oleh Presiden RI pada saat kunjungan Presiden Mahmoud Abbas ke Indonesia tanggal 28-29 Mei 2010 dan disalurkan melalui *Islamic Development Bank (IDB)*.
- c. Adapun bantuan finansial lainnya berasal dari sumbangan, yakni mencakup bantuan beberapa lembaga masyarakat non pemerintah sebesar USD. 1,000,000 pada akhir tahun 2012 yang dikumpulkan oleh beberapa LSM Indonesia dari sumbangan masyarakat dan diserahkan kepada Pemimpin Hamas, Ismail Haniya. Terdapat pula bantuan sebesar USD. 233,000 yang digalang dari kalangan pejabat dan kolega pada saat kunjungan Ketua DPR RI ke Gaza akhir tahun 2012.

Dalam kerangka *inter-regional*, sejak tahun 2008 Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melatih 1000 orang Palestina selama 5 tahun (2008-2013) dalam kerangka *New Asian African Strategic Partnership (NAASP)*. Lebih dari 1257 orang Palestina tercatat telah

menerima manfaat berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan Indonesia untuk Palestina. Bidang-bidang pelatihan yang telah diberikan antara lain adalah *project cycle*, ukm, keuangan dan perpajakan, *microfinance*, pertanian, pelatihan diplomatik, kearsipan, kesehatan, energi, pemberdayaan perempuan, demokratisasi & *good governance*, perindustrian, konservasi dan restorasi monument dan situs, konstruksi, sosial dan tekstil.

Dalam kerangka *regional*, Indonesia juga mendukung inisiatif kerja sama negara-negara Asia Tenggara dan Timur yang tercermin pada partisipasi aktif Indonesia dalam penyelenggaraan “*Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development*” (CEAPAD). Pada tanggal 1 Maret 2014, Indonesia telah menyelenggarakan CEAPAD II di Jakarta, dengan menghasilkan beberapa komitmen bantuan kapasitas dari negara-negara di Asia.

Dalam kerangka *multilateral*, dukungan Indonesia juga disampaikan dalam bentuk dana bantuan melalui badan-badan PBB. Dukungan dana bantuan diberikan Indonesia kepada Palestina melalui kontribusi pada *The United Nations Relief Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* sebesar USD 100.000 untuk tahun 2012 dan 2013, serta *pledge* pada *United Nations Education Scientific Organisation (UNESCO)* sebesar USD 10.000.000 untuk membantu mengatasi dampak pembekuan sumbangan Amerika Serikat kepada UNESCO yang disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dalam *General Conference UNESCO* di Paris.

Sejak berdiri, ACT (Aksi Cepat Tanggap) senantiasa memerhatikan penderitaan rakyat Palestina sebagai

bagian dari visi ACT, yakni sebagai pioneer dalam menggugah jiwa peduli. Beberapa kali ACT mengirimkan tim ke Palestina dengan focus memberikan bantuan untuk masyarakat Palestina, terutama wilayah yang terdampak perang seperti Jalur Gaza.

Konflik Palestina dengan Israel

Konflik Israel-palestina memang sudah berlangsung sejak lama. Palestina sebagai penduduk asli merasa terganggu dengan datangnya imigran yahudi yang berbondong-bondong datang ke tanah palestina. Kemudian muncul Resolusi PBB yang membagi wilayah Palestina. Wilayah dibagi menjadi tiga bagian yaitu wilayah Arab-Palestina, wilayah Israel, dan Yerusalem yang dikelola dunia internasional. Pembagian tersebut tidak disetujui oleh mayoritas penduduk Palestina karena wilayah Israel pembagiannya lebih luas dibandingkan wilayah Palestina. Israel mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara pada 14 Mei 1948 setelah resolusi PBB. Konflik Israel dan Palestina menjadi salah satu elemen dasar yang banyak digunakan oleh penstudi hubungan internasional untuk memahami kawasan Timur Tengah yang penuh dengan konflik. Konflik yang berkepanjangan tersebut telah melahirkan beberapa konflik, yakni Perang yang terjadi pada tahun 1948-1949 –oleh Israel dikenal sebagai “Israeli War of Independence” dan oleh Palestina dikenal sebagai “al-Nakba” (Bencana). Dimulai setelah dikeluarkannya rencana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November 1947 yang mengusulkan pembentukan negara Yahudi di Palestina. Negara-negara Arab –termasuk Palestina di dalamnya, menolak rencana tersebut. Namun di sisi lain, Kemudian, perang juga terjadi tahun 1967 yang

dikenal dengan nama Six Day War. Dalam waktu enam hari, Israel berhasil mengalahkan tiga negara tetangganya, yaitu Mesir, Jordan, dan Syria. Akhir Perang Enam Hari, Israel menemukan kepercayaan dirinya, mulai dikenal sebagai kekuatan yang tangguh di dunia, dan mendapatkan wilayah tiga kali ukuran sebelumnya. Selain itu, masih banyak juga konflik senjata yang terjadi antara Israel dan Palestina. Perang antara Israel-Palestina pada dasarnya adalah perang dua kepentingan, land and peace adalah permintaan masing-masing pihak. Kedua pihak saling memiliki kepentingan yang tidak dapat dipenuhi satu sama lain, menyebabkan konflik masih terjadi sampai saat ini, terutama di daerah seperti Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Gohlan.

Kedua belah pihak dari Israel maupun palestina sama-sama punya klaim atas wilayah palestina. Mereka sama-sama ngotot bahwa mereka adalah bangsa yang paling layak menghuni wilayahpalestina. Dalam kasus ini mungkin palestina adalah negara yang apling dirugikan. Israel seolah memberi contoh tentang bentuk kolonialisme pada abad ini dengan melakukan serangkaian terror dan serangan bersenjata diwilayah palestina. Tentunya harus ada penengah dalam kasus ini. PBB sebagai lembaga internasional antar pemerintah dunia diharapkan mampu berperan dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan palestina. PBB harus netral disini, tidak boleh berat sebelah, namun kenyataan yang terjadi bahwa PBB seolah lebih berpihak pada Israel ketimbang memberla kepentingan palestina. Dalam perkara ini tentunya anggota dewan keamanan PBB sangat punya peran besar dalam menanggulangi krisis dipalestina. Amerika serikat sebagai motor ataupun

polisi dunia seolah bungkam dan tidak mau tahu atas apa yang terjadi di palestina. Yang menjadi ironis yakni amerika serikat sebagai negara penyumbang dana terbesar Israel. PBB harusnya punya sikap yang tegas terhadap Israel, namun yang terjadi hanya lip service berupa kecaman atas tindakan Israel ke palestina. Secara nyata dan kongkrit PBB seolah tidak berani untuk ikut campur terhadap krisis yang terjadi disana. Padahal PBB punya tugas menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Intervensi Amerika terhadap Palestina dalam Melindungi Kepentingan Israel

Amerika Serikat ingin mempertahankan keutuhan Negara Israel karena Israel merupakan batu tumpuan utama AS untuk meluluskan segala kepentingannya di kawasan Timur Tengah. Dalam lapisan luar, AS boleh saja mengatakan bahwa kepentingan utamanya adalah merealisasikan manifested destiny of USA: menyebarkan demokrasi liberal ke seluruh dunia, dan bahwa Israel adalah aliansi kuncinya untuk melancarkan kepentingan tersebut di kawasan Timur Tengah. Dan memang, Israel sejak masa Perang Dingin telah menjadi patron di Timur Tengah yang membantu AS mengatasi gerakan-gerakan ekstremis dan radikal dari dunia Arab. Israel selain menjadi perpanjangan tangan AS di Timur Tengah juga menjadi sumber informasi dan strategi untuk menghadapi gerakan-gerakan terorisme yang mengancam keamanan nasional AS.

Meskipun kelihatannya AS banyak menggelontorkan dana dari hasil pemungutan pajak warga negaranya untuk Israel dalam bentuk peralatan perang, tetapi sesungguhnya Israel sangat bermanfaat, mengurangi potensi pengeluaran AS dalam jumlah milyaran dollar karena AS tidak perlu mengirim

masukannya secara langsung ke Timur Tengah. Di lapisan dalam, dan berhubungan juga dengan *power projection* AS melalui Israel, ada kepentingan lain yang sangat signifikan: suplai minyak. AS tidak ingin kehilangan akses terhadap wilayah yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia lantaran memiliki perbedaan ideologi dengan inhabitants asli kawasan tersebut. Untuk itulah, Israel sangat diperlukan AS untuk menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah, sekaligus mengamankan jalur suplai dan perdagangan minyak AS. Atas dasar ini, adalah penting bagi AS untuk menjaga dan mendukung keutuhan serta kemakmuran Israel lantaran menjadi aset vital bagi pemenuhan kepentingan nasionalnya sendiri.

Terbentuknya pemerintahan Otorita Palestina yang membawahi Jalur Gaza dan Tepi Barat. Di bawah perjanjian ini Palestina mulai mendapat wewenang memerintah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Palestina bahkan sudah bisa membentuk perangkat pemerintahan, kepolisian, parlemen, dan institusi pemerintahan lain. Balasannya, Otorita Palestina harus mempromosikan toleransi terhadap Israel dan mengakui hak Israel untuk tetap eksis. Namun perjanjian tersebut dilanggar oleh pihak Israel dengan terus melakukan terror di wilayah jalur Gaza dan menghalangi pembentukan pemerintahan Palestina. Maka kondisi ini ditentang oleh pihak Hamas dari Palestina karena Israel melanggar perjanjian tersebut. PBB pun mengalami kejenuhan dan kegelisahan atas kejadian pelanggaran perjanjian tersebut. Maka dalam hal ini PBB sebagai mediator malah seolah tidak lagi dihargai bahkan tidak dipercaya oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Dengan demikian efektifitas PBB dalam mencegah konflik antara Israel dan Palestina agaknya

mengalami berbagai macam halangan sehingga bisa dikatakan PBB gagal dalam mencegah konflik Israel-Palestina.

Harusnya PBB punya sikap yang tegas terhadap Israel dengan beberapa pelanggaran perjanjian yang telah disepakati. Sehingga Israel punya rasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun lagi-lagi adanya suatu kepentingan AS di Timur Tengah lewat Israel maka akan sangat sulit untuk bisa meredam bahkan mendamaikan pihak Israel dan Palestina. Salah satu kunci perdamaian konflik antara Israel dan Palestina dipegang juga oleh Amerika Serikat. Kepentingan AS inilah yang menjadi salah satu sumber tidak selesainya konflik antara Israel dan Palestina. Selain peran PBB dan AS, Israel dan Palestina sendiri juga harus bisa menjajaki hubungan baik antar kedua negara. Walaupun kita tahu bahwa Palestina sudah sangat underestimated terhadap Israel dengan *track record* yang pernah terjadi.

Dukungan Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina

Pasca kemerdekaan, melalui Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, Bung Karno lantas mendorong kemerdekaan bagi negara-negara di Asia-Afrika, termasuk Palestina. Sejumlah negara di Asia-Afrika yang kemudian memproklamkan kemerdekaannya, antara lain Sudan, Maroko, Ghana, Togo, Kongo, Mali, Nigeria dan Yaman Utara. Di sini, Bung Karno mengirimkan sinyal yang jelas tentang dukungan pada kemerdekaan Palestina dengan menolak partisipasi Israel dan sebaliknya menghadirkan pejuang Palestina, Yasser Arafat. Palestina memang belum merdeka setelah itu, dan hingga saat ini. Namun sikap

dukungan kepada Palestina telah ditunjukkan Bung Karno dalam pidatonya pada tahun 1962: “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”

Selepas kepemimpinan Bung Karno, mulai dari era Presiden Soeharto hingga kini Presiden Jokowi, Indonesia terus mendukung penuh kemerdekaan Rakyat Palestina. Upaya menggalang dukungan kerja sama Selatan-Selatan untuk mendukung kemerdekaan Palestina pun dikumandangkan Presiden Jokowi dalam peringatan 60 tahun KAA pada bulan April 2015. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan setingkat menteri negara-negara Asia Timur (*The Second Conference of Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development*, CEAPAD II) di Jakarta di bulan Maret 2014 menyerukan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. “Kita menantikan pengakuan dunia atas kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina, serta sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Melalui pidatonya di Gedung DPR MPR pada tanggal 14 Agustus 2015, Presiden Jokowi telah menyerukan agar Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden juga menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai. Tak berhenti di situ, dalam pertemuan tingkat regional ASEAN, isu ini terus diangkat. “Saya ingin mendorong agar ASEAN dan AS terus dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah Palestina,”

⁹ <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/jalan-panjang-dukungan-ri-untuk-kemerdekaan-palestina.html>

tutur Presiden Jokowi saat menghadiri acara santap malam US-ASEAN Summit di Sunnylands Historic Home pada tanggal 15 Februari 2016, yang dihadiri oleh para Kepala Negara ASEAN dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.⁹

Indonesia di fokuskan hanya pada isu-isu agama tanpa ada kajian faktor sosial ekonomi maupun perebutan wilayah sumber daya alam, maka tentu sangat sulit untuk ditempuh. Sebaiknya Indonesiamengambil jalur mobilisasi politik antar negara maupun kawasan dengan negara Arab maupun negara Eropa sehingga kesepakatan perdamaian dapat tercapai. Memang hal ini sungguh sulit untuk dilakukan mengingat bangsa Indonesia juga berada dalam cengkraman *politic of collaboration capitalism and neoliberalism* maupun dengan negara-negara pendukung penuhnya yakni Amerika Serikat.

Sejarah Pengangkatan Konsulat Kehormatan Indonesia di Palestina

Pemerintah Indonesia telah mendirikan konsulat kehormatan Republik Indonesia (RI) di Ramallah, Palestina. Meski demikian peresmian konsulat kehormatan ini tidak dilakukan di Ramallah, Palestina, melainkan di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania. Konhor di Ramallah dibuka oleh Menlu Retno Marsudi pada tanggal 13 Maret 2016. Maha Abu-Shusheh adalah warga Palestina yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi Konhor di Ramallah. Memiliki latar belakang pengusaha Susheh

merupakan Ketua Forum Pengusaha Wanita Palestina (BWF) di Ramallah. BWF merupakan organisasi non-profit yang bergerak untuk memajukan perekonomian kaum wanita Palestina. Susheh berhasil masuk ke dalam daftar 50 pengusaha wanita paling berpengaruh versi Majalah Forbes Arab. Dia juga menjadi Presiden pada Dewan Direksi Riwaq yang membawahi isu perlindungan warisan arsitektur. Susheh juga merupakan anggota *Palestina Trade Center*.

Sebagai konsuler kehormatan, Susheh hanya mengurus isu terkait non politik seperti ekonomi dan pariwisata. Tugas Maha Abu Susheh sebagai Konsulat Kehormatan antara lain meningkatkan kerja sama ekonomi, sosial dan budaya antara Indonesia dan Palestina, promosi investasi dan pariwisata, serta perlindungan warga negara Indonesia bila diperlukan. Dengan adanya konsuler kehormatan ini, juga membantu warga Palestina yang ingin ke Indonesia. Sebab, mereka tidak lagi perlu mengurus visanya ke KBRI di Amman, Yordania.

Keputusan untuk tetap melakukan peresmian konsulat kehormatan ini menurut Retno tetap diambil pada Minggu, meski ada pelarangan dari pihak Israel sehari sebelumnya. Retno menjelaskan selama proses menjelang peresmian, ia terus melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Palestina.

"Dan kita ambil satu keputusan yang saya kira ini adalah satu keputusan yang sangat tepat. Karena misi saya yang diberikan oleh Presiden adalah melantik konsul kehormatan. Dan pelantikan itu tetap dapat dilaksanakan," lanjutnya.

Retno Marsudi menegaskan, belum ada permintaan secara resmi dari Israel untuk bertemu. Pemerintah Indonesia lanjut Retno tidak pernah membahas rencana

pendirian konsulat kehormatan ini dengan pihak Israel. Retno menggarisbawahi, pendirian konsulat kehormatan bukan menjadi urusan dari Israel.

Retno Marsudi menjelaskan hubungan kerjasama antara Indonesia–Palestina khususnya di bidang ekonomi terus mengalami peningkatan. Sejak 2004 hingga 2015 tren peningkatan perdagangan Indonesia-Palestina mencapai 300 persen. Kerjasama bidang ekonomi ini menurut Retno yang menjadi salah satu tugas dari konsul kehormatan Indonesia yang dijabat oleh Maha Abu Shusha, warga Palestina, yang ditunjuk sebagai konsul kehormatan Indonesia untuk Palestina. Selain di bidang kerjasama ekonomi, masalah perlindungan warganegara Indonesia di Palestina juga menjadi cakupan kerja dari konsul kehormatan.

"Dan yang penting lagi adalah masalah proteksi terhadap warganegara Indonesia yang berkunjung ke Palestina. Dalam satu tahun ada kurang lebih 50 ribu orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke Palestina. Jadi dengan adanya konsul kehormatan, warga Indonesia akan lebih nyaman. Kalau terjadi apa-apa, ada alamat ada kontak orang yang dapat di raih sesegera mungkin," imbuh Menlu Retno Marsudi.

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan organisasi negara-negara Islam (OKI) beberapa pekan lalu mengeluarkan pernyataan yang cukup keras seputar konflik Palestina-Israel. Presiden Jokowi saat itu menegaskan Pemerintah Indonesia dan dunia Islam, mendesak Israel segera menghentikan aksi pendudukan atas Palestina.

"Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Israel harus segera menghentikan aktivitas dan kebijakan ilegalnya di wilayah pendudukan.

Indonesia dan dunia Islam siap melakukan langkah konkret untuk terus mendesak Israel mengakhiri penjajahannya atas Palestina dan menghentikan kesewenang-wenangan di Al Quds Al Sharif," imbuh Presiden Joko Widodo.

Beberapa poin kesepakatan yang dihasilkan dalam KTT Luar Biasa OKI ini diantaranya, komitmen bersama mendukung Al Quds Al Syarief (Kota Suci Yerusalem), berupa bantuan finansial bagi Al Quds Fund. Presiden Jokowi yang membacakan hasil keputusan dari pertemuan OKI menegaskan adanya seruan pemboikotan produk Israel dan rekonsiliasi negara Palestina.

"Kami menyerukan pengakhiran penjajahan Israel. Dan pembentukan negara Palestina atas dasar two-state solution. Para pemimpin juga mendukung dilaksanakannya konferensi perdamaian internasional. Dunia Islam mendorong masyarakat internasional untuk melarang masuknya produk Israel. Negara-negara OKI juga mendukung rekonsiliasi negara Palestina," imbuh Presiden Jokowi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1963, maka penjelasan tentang pengauran hukum diplomatik ini tertuang dalam Undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan. Namun dalam undang-undang ini masih berisi pengaturan secara umum. Pengaturan secara terperinci tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia no.108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan menteri luar negeri. Penjelasan tentang pengaturan dari konsul kehormatan pun telah ditetapkan oleh

menteri luar negeri. Secara khusus dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Konsul kehormatan Republik Indonesia. Dalam setiap perwakilan negara memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Dimana mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perwakilan yang ada di wilayahnya. Dalam proses pengangkatan konsulat kehormatan di Palestina, ini sudah direncanakan sejak tahun 2010. Namun dalam proses pelaksanaannya hal ini banyak sekali menemui hambatan yang memang cukup menghambat proses implementasi dari inisiasi rencana pemerintah Indonesia ini. Kemudian, jika dilihat dari peraturan perundang – undangan Indonesia pengangkatan Konsul Kehormatan Kembali dijelaskan secara rinci dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Luar Negeri no.1 tahun 2014:

- Perwakilan mengusulkan Konsul Kehormatan kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- Tim Penilai melakukan penilaian terhadap usulan Konsul kehormatan.
- Tim penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal.
- Sekretaris Jenderal merekomendasi kepada Menteri Luar negeri mengenai pengangkatan Konsul kehormatan.
- Menteri Luar Negeri menyampaikan usulan pengangkatan Konsul Kehormatan kepada Presiden.
- Presiden menetapkan keputusan presiden tentang Pengangkatan, Perpanjangan, Pemberhentian dan surat taulia (Letter of Commission).

- Menteri Luar Negeri menetapkan masa tugas Konsul Kehormatan kepada Presiden.
- Sekretaris Jenderal menyampaikan petikan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf F kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.

Dimana dalam pasal 7 ini lebih menekankan pada proses penilaian dari tempat yang akan dibuka konsul, serta proses pengangkatan yang dilakukan oleh menteri luar negeri yang diberikan surat tugas dari Presiden lewat surat keputusan Presiden. Kemudian pada pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menetapkan masa tugas Konsul Kehormatan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden. Jelas dijelaskan oleh pasal-pasal tersebut bahwa pelaksana tugas dari Presiden atau perpanjangan tangan dari presiden adalah Menteri Luar negeri.

Berdasarkan peraturan yang dijelaskan di atas tersebut, merupakan proses pengangkatan konsul kehormatan yang memang harus melalui beberapa tahap dan pertimbangan sebelum hal tersebut dapat terlaksana. Hal inilah yang menyebabkan proses dalam pengangkatan konsul kehormatan yang sudah sejak tahun 2010 inisiasinya namun baru disetujui oleh Ibu Maha Abu Shuseh pada tahun 2015, karena memang hal ini harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Setelah melewati serangkaian proses di atas dan disetujui oleh Presiden barulah dilakukan pengangkatan oleh menteri luar negeri. Proses pengangkatan Konsul kehormatan Indonesia untuk palestina telah dilakukan pada 13 Maret 2016 oleh

menteri luar negeri. Pelantikan dan pembukaan kantor Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina ini merupakan suatu bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina sesama negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dimana pada tanggal 6-7 Maret 2016 baru melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilaksanakan di Jakarta. Pengangkatan konsul ini dilakukan karena telah ada persetujuan atau kesepakatan kedua negara yang akan melaksanakan hubungan konsul tersebut. Setelah itu, proses pengangkatan pun dilakukan karena telah adanya surat keputusan dari presiden dimana sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar negeri. Setelah surat keputusan Presiden di keluarkan, Konsul pun dilantik dan dibuka oleh Menteri Luar Negeri. Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina ini yang dikepalai oleh Maha Abu-Shushah seorang pengusaha yang merupakan warga asli Palestina ini tidak di lantik di Ramallah melainkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Amman di Kerajaan Yordania Hasyimiah, karena telah memenuhi syarat pada proses Pengangkatan yang ada seperti disepakati bersama oleh kedua belah pihak negara yakni negara pengirim dan negara penerima sesuai dengan hukum diplomatik dan konsuler yang berbunyi:¹⁰

- Pembentukan hubungan konsuler antara Negara berlangsung dengan persetujuan bersama.
- Persetujuan diberikan kepada pembentukan hubungan diplomatik antara dua Negara menyiratkan, kecuali dinyatakan

¹⁰Konvensi Wina tahun 1963 Pasal 2.

lain, menyetujui pembentukan hubungan konsuler.

- Setelah pemutusan hubungan diplomatik tidak akan “ipso facto” melibatkan pemutusan konsuler hubungan.
- Kemudian pengangkatannya telah disetujui oleh Presiden lewat Surat Keputusan Presiden yang dikeluarkan dan dilantik oleh Menteri Luar Negeri sebagai pelaksana keputusan presiden tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Peran dan Fungsi Konsulat Kehormatan Indonesia di Palestina

Fungsi dari konsulat kehormatan ini antara lain Perlindungan terhadap warga negara dari negara yang mengirim, pelaksanaan jalinan hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial budaya dengan melakukan promosi dalam setiap bidangnya yakni seperti perdagangan, pariwisata, investasi dan promosi lainnya yang disertakan dengan laporan setiap waktu yang ditentukan.

Tugas dan fungsi ini tertera dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Luar Negeri no.1 tahun 2014. Pasal 3 ; “Konsul Kehormatan mempunyai tugas untuk membantu pelaksanaan sebagai tugas dan fungsi perwakilan yang membawakannya di wilayah kerja tertentu di negara penerima” Pasal 4, Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, konsul kehormatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹¹

- Pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia

- Peningkatan hubungan dan kerjasama ekonomi dan sosial budaya
- Promosi ekonomi, perdagangan, pariwisata, investasi, tenaga kerja dan jasa
- Promosi sosial budaya
- Pengamatan dan pelaporan.

Maka dari itu berdasarkan hal tersebut, untuk saat ini Konsulat Kehormatan Indonesia untuk Palestina lebih berfokus kepada usaha peningkatan hubungan ekonomi, seperti *Joint Business Council* dimana maksudnya adalah Indonesia dan Palestina akan bergerak bersamadi bidang ekonomi, Indonesia menyatakan akan mengefektifkan kerja sama bisnis (*Joint Business Council*) antara Indonesia dan Palestina dalam mencari peluang baru antara dua negara, seperti kerja sama untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti minyak ataupun gas.¹² Terakhir Konhor juga membantu pihak Indonesia terkait pelatihan Capacity Building. Jadi salah satu bentuk dukungan Indonesia ke Palestina itu program Capacity Building. Kalau di Kemlu itu yang nanganin Direktorat Kerjasama Teknik. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan capacity building, itu temanya bukan kita yang menentukan, tapi dari mereka minta apa. Jadi pada saat bertemu dengan pihak Palestina dari kementerian-kementerian terkait, kita tanya pada mereka butuh pelatihan tentang apa, nanti kalau pihak Indonesia bisa mengakomodasi. Yang di latih biasanya dari pegawai-pegawai negeri. Tahun 2016 lalu, polisi-polisi Palestina datang ke

¹¹Peraturan Menteri Luar Negeri no.1 tahun 2014, pasal 3 dan 4.

¹² Widi. “Kontribusi Indonesia Untuk Palestina”. Mirajnews (1 Maret 2014). Internet. 25 September 2017. www.mirajnews.com

Jakarta untuk mengikuti pelatihan *cyber crime*.

Tahun ini sudah dilakukan satu pelatihan tentang pariwisata, perawatan benda-benda purbakala di Balai Konservasi Borobudur. Ada sekitar 15 orang Palestina yang mengikuti pelatihan tersebut yang akomodasinya di tanggung penuh oleh Pemerintah Indonesia sebagai wujud komitmen pada Palestina. Pada KTT LB OKI, salah satu janji Presiden Jokowi adalah memberikan bantuan kepada Palestina kurang lebih USD 1,5 juta dalam bentuk pelatihan *capacity building*.

Delegasi Palestina juga datang ke Astindo Fair pada bulan Maret untuk promosi pariwisata. Jadi, salah satu tugas Konhor juga untuk menjembatani. Fungsi Konhor lebih sebagai foot hold Pemerintah Indonesia untuk mempromosikan Indonesia, tapi juga untuk membantu menjadi mediator antara kedua pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab di atas penulis menarik suatu kesimpulan bahwa Indonesia memiliki motivasi yang kuat dalam membantu Palestina untuk mencapai kemerdekaannya. Amanat UUD 1945 dalam pembukaannya memberikan falsafah yang bersifat instruktif bahwa penjajahan diberbagai belahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan hak-hak prike-manusiaan dan keadilan. Disamping itu Indonesia juga memiliki kedekatan sejarah dimana Palestina merupakan Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus 1945. Maka daripada itu sampai saat ini Indonesia menjadi Negara yang

paling berpengaruh untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Adapun salah satu cara yang dilakukan Indonesia yaitu pengangkatan konsulat kehormatan di Palestina. Dalam membantu proses kemerdekaan Palestina memiliki hambatan-hambatan yang tidak lepas dari intervensi atau campur tangan Negara Israel. Hal ini juga yang mengakibatkan Indonesia lebih memilih mengangkat konsulat kehormatan daripada membentuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan mengirimkan seorang duta besar ke Palestina.

Konhor di Ramallah dibuka oleh Menteri luar negeri, Retno Marsudi pada tanggal 13 Maret 2016. Maha Abu-Shusheh adalah warga Palestina yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi Konhor di Ramallah. Memiliki latar belakang pengusaha Susheh merupakan Ketua Forum Pengusaha Wanita Palestina (BWF) di Ramallah. Sebagai konsuler kehormatan, Susheh hanya mengurus isu terkait non politik seperti ekonomi dan pariwisata. Tugas Maha Abu Susheh sebagai Konsulat Kehormatan antara lain meningkatkan kerja sama ekonomi, sosial dan budaya antara Indonesia dan Palestina, promosi investasi dan pariwisata, serta perlindungan warga negara Indonesia bila diperlukan. Dengan adanya konsuler kehormatan ini, juga membantu warga Palestina yang ingin ke Indonesia. Sebab, mereka tidak lagi perlu mengurus visanya ke KBRI di Amman, Yordania.

Bukti nyata dukungan Indonesia bagi Palestina Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib, mengatakan dengan adanya konsul kehormatan maka ada jejak nyata Indonesia di area Tepi Barat, Palestina. Sebelumnya, Indonesia juga sudah

memberikan dukungan nyata dalam bentuk pembangunan rumah sakit di kota Gaza. Susheh akan bekerja dari kantor pribadinya untuk mengurus isu konsuler. Bendera Indonesia juga akan dikibarkan di sana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adji Samekto. 2009. Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti

Adolf Huala. 1991. Aspek-Aspek Negara Dalam hukum Internasional. Jakarta: Rajawali

Boer Mauna. 2005. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Edisi ke 2. Bandung: Alumni

Jawahir Thontowi. 2006. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: Refika Aditama

Jackson, Robert & George Sorensen. 1999. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar

Lexy J. Meleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Lisa Harison. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Predana Media Group

Lovell Jonh P. 1970. Foreign Policy in Perspective. New York: Rinehart & Winston

Mas' oed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi. Jakarta: LP3S

Mochtar Kusumaatmadja. 1981. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta

Morton A. Kaplan. 1964. System And Process In International Politics. New York: Wiley Publisher

Plano Jack C. & Olton Roy. 1960. The International Relations Dictionary. New York: Holt Rinwart And Winston Inc

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. International Relations And World Politics Security, Economy, Identity. New Jersey: Prentice.

Sugeng Istanto. 1994. Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atmajaya

Surakmat, Winarno. 1968. Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung: Badan Penerbit IKIP

Jurnal:

Diplomasi Indonesia Dalam Mendukung Palesttina Menjadi Negar Peninjau di PBB Tahun 2012 diambil dari: <http://download.portalgaruda.org/article>.

Website:

<http://www.voaindonesia.com/a/meski-ditolak-israel-indonesia-resmi-dirikan-konsulat-kehormatan-ri-untuk-palestina/3237181.html>

<http://www.kemlu.go.id/id/kedutaan/default.aspx>

<http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/07/22/558800/temui-konhor-ri-untuk-palestina-dpr-tegaskan-tolak-pejajahan-israel>